



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL UMKM DI KOTA PEKANBARU MENURUT PANDANGAN FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

MARDIANI HARAHAHAP
NIM. 11720425090

**PROGRAM SI JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1442 H / 2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UMKM di Kota Pekanbaru menurut Pandangan Fiqh Siyasaah”** yang ditulis oleh:

Nama : MARDIANI HARAHAAP

NIM : 11720425090

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 1442 H
2021 M

Pembimbing Skripsi

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530199303 2 001

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL UMKM DI KOTA PEKANBARU MENURUT PANDANGAN FIQIH SIYASAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : MARDIANI HARAHAHAP
NIM : 11720425090
Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/tanggal : Senin, 05 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ujian Online

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SL., MA

Penguji 1
Dr. Zainal Arifin., MA

Penguji 2
Rahman Alwi., M. Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mardiani Harahap, 2021 : Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UMKM Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah.

Kehalalan suatu produk merupakan suatu hal yang terpenting dalam membuat usaha khususnya PEMBIMMakanan di Kota Pekanbaru. Makanan merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan. Dengan banyaknya usaha UMKM pada produk makanan di Kota Pekanbaru yang belum memiliki syarat sertifikasi halal, maka pemerintah dalam hal ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dari permasalahan tersebut penulis mengangkat beberapa pokok rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk halal UMKM oleh Dinas Koperasi?, dan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk halal UMKM di Kota Pekanbaru menurut pandangan *fiqih siyasah*?. Jenis penelitian ini adalah sosiologis hukum dengan metode lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru. Data primer yang didapat dari pihak Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru. Data sekundernya adalah data yang didapat dari pengusaha UMKM Kota Pekanbaru, buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Setelah mengetahui permasalahan yang ada melalui wawancara dan observasi di lapangan, maka penulis meninjau dengan pandangan *fiqih siyasah* berdasarkan Al-Qur'an, hadist-hadist dan kaidah-kaidah *fiqih* untuk memperkuat kesimpulan yang ditarik. Jadi, dari uraian dan dari berbagai tinjauan tersebut maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru masih belum mendapat hasil yang maksimal, dimana tugas dinas tersebut adalah memberikan izin usaha kepada masyarakat serta mengawasi produk-produk UMKM yang sudah memiliki ataupun yang belum memiliki label halal. Dalam hal ini, untuk mendapatkan izin usaha masih ada yang tidak memerlukan syarat sertifikasi halal dari MUI. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru mengambil suatu kebijakan bahwa syarat sertifikasi halal dari MUI dalam membuat izin usaha tidak diwajibkan, karena pengurusannya sangat rumit. Tinjauan *fiqih siyasah* dalam penelitian ini adalah *siyasah dusturiyah*, yang mana aturan akan jaminan produk halal tersebut sudah diterapkan dan dijalankan sesuai dengan kaidah tersebut yang mementingkan kemaslahatan masyarakat. Walaupun belum sepenuhnya diterapkan dan terdapat banyak kendala serta keluhan dari berbagai pihak, maka hal tersebut seharusnya tidak mengganggu kinerja dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru untuk bisa menjadi acuan menentukan jaminan produk tersebut halal karena sudah diawasi dan dicek oleh mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis lanturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada sang revolusioner abadi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang senantiasa kami harapkan syafaatnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya yang berjudul “ Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UMKM Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1). Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Orang tua tercinta Ayahanda Saprial dan Ibunda Ermita yang membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terimakasih Ayahanda dan Ibunda atas segala do'a, motivasi dan dukungannya baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, selaku Wakil Dekan I, Dr. Wahidin, S. Ag, M. Ag, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Rahman Alwi, S. Ag, MA dan Bapak Irfan M. Ag selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Rahman Alwi, S. Ag, MA, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Pembimbing Konsultasi Proposal sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Keluarga tersayang penulis Abang Asri Sugara dan Adik Penulis Dedi Efrizal, Wandri Syahputra, Haikal Al-Ghari dan semua keluarga yang telah memberikan bantuan materil dan memberikan semangat bagi penulis.
11. Seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Masitha Nur Rohimah, Raja Ilham Nur Arif, Nahdia Dulsan, Nur Aisyah, Nina Rahma Panggabean, Rinny Nurhayati, Nurul Nabila, Robbiatul Addawiyah, Indah Nurahmi, Berry Parma, Julheri Pradana, Raudatul jannah, Lusiana Putri, Nurul Annisa, Murni Imelda, Dedi Gunawan, Rifan Nurfala, serta orang yang selalu ada Muhammad Yani, dan sahabat yang selalu ada Yosi Imelda, Miftahul Jannah, Malvi Angraini, Davadila Aufani, Utari, Al-Amin, yang telah banyak memberikan dorongan dan Do'a kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun demikian, semoga skripsi ini mampu memberi sedikit manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta seluruh praktisi yang berhubungan dengan skripsi ini.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Penulis,

Mardiani Harahap
NIM. 11720425090

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sitematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian UMKM	17
B. Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru	18
C. Visi, Misi dan Rincian Tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru	20
D. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru	23
E. Bidang-bidang Kerja Kepegawaian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru	24
F. Aktivitas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru ...	33
G. Bagan Susunan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru	35
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Produk Halal	36
B. Pengertian Sertifikasi	38
C. Sejarah dan Penjelasan Tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	39

BAB IV

D. Pengertian Fiqih Siyasah	41
E. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	42
F. Pengertian Siyasah Dusturiyah	43
G. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah	44
H. Peran Pemimpin Dalam Islam	45

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Produk Halal UMKM Oleh Dinas Koperasi	49
B. Penerapan Undang-Undanmg Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UMKM Menurut Pandangan Fiqih Siyasah	63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

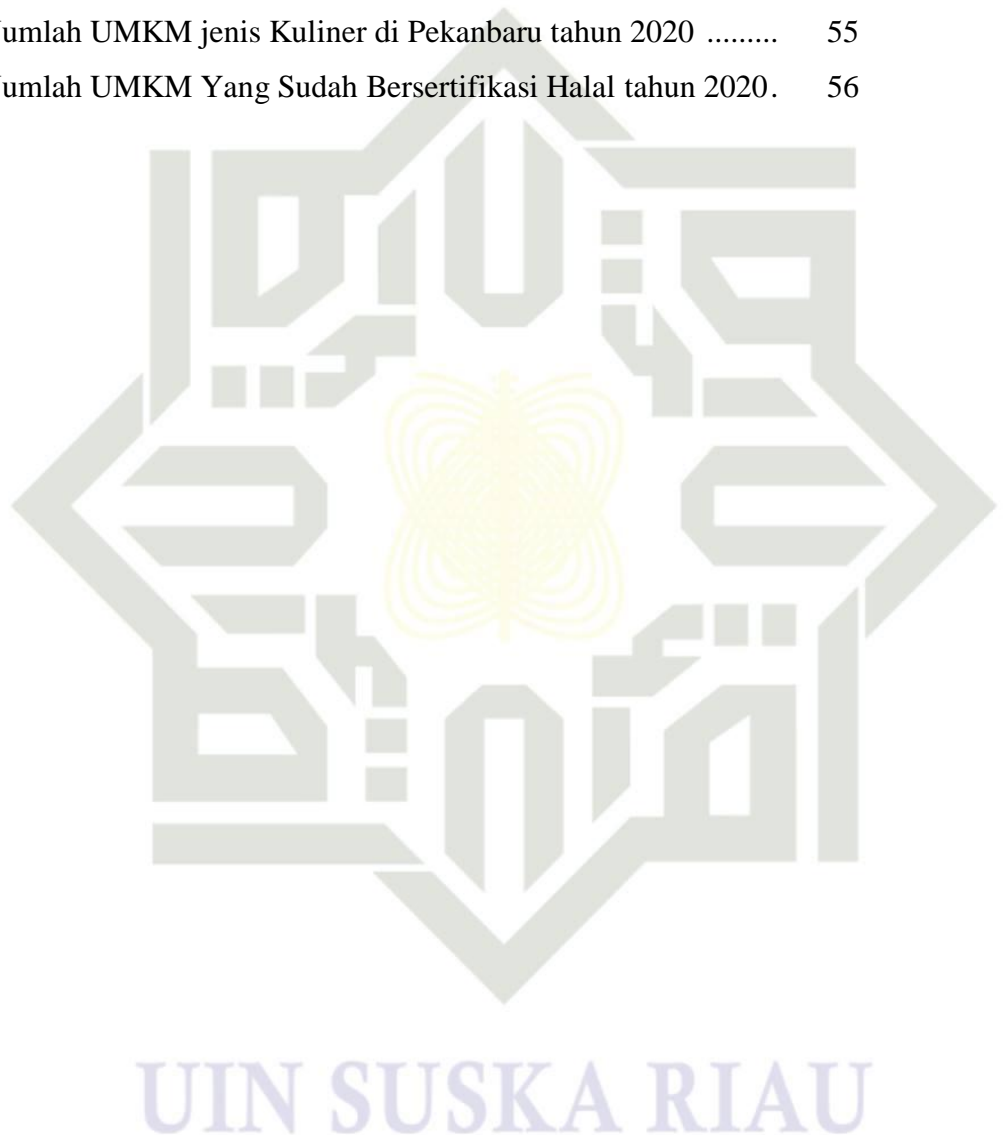
RIWAYAT HIDUP PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah UMKM jenis Kuliner di Pekanbaru tahun 2020	7
Tabel IV.1	Identitas Informan Penelitian Berdasarkan Jabatan	53
Tabel IV.2	Jumlah UMKM jenis Kuliner di Pekanbaru pada tahun 2018	54
Tabel IV.3	Jumlah UMKM jenis Kuliner di Pekanbaru tahun 2019	54
Tabel IV.4	Jumlah UMKM jenis Kuliner di Pekanbaru tahun 2020	55
Tabel IV.5	Jumlah UMKM Yang Sudah Bersertifikasi Halal tahun 2020.	56



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan makanan sehari-harinya. Mereka membutuhkan makanan untuk kebutuhan dan kesehatan jasmani serta rohaninya. Sejak dahulu, umat dan bangsa-bangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.¹ Dalam memilih makanan yang baik, sebagai umat muslim hendaknya memilih makanan yang sehat menurut Islam. Dalam ajaran Islam, banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan, dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika ketika makan, sampai mengatur idealitas dan kuantitas di dalam perut. Seruan Allah kepada umat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan menyehatkan tidak lain adalah demi tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”²

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993), Hlm. 42-44

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar*: Juz 1-30, (Bandung : Jawa Barat, 2018), Hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bagi umat Islam, mengkonsumsi atau menggunakan produk halal merupakan suatu kebutuhan yang mutlak karena merupakan perintah dalam agama Islam. Tidak hanya bersifat anjuran tapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan³. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mai'dah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepada mu dan takwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".⁴

Jadi, Allah SWT memerintahkan kepada kita umat muslim, makanlah makanan yang halal dan bersyukurlah terhadap apa yang telah Allah SWT rezekikan untuk kita. Meskipun begitu, mengkonsumsi makanan halal juga harus sesuai dengan kebutuhan atau secukupnya. Karena, memakan makanan yang berlebihan tidak baik bagi tubuh dan dapat menimbulkan penyakit.

Selain mengkonsumsi makanan yang berlebihan, mengkonsumsi produk yang tidak halal juga dapat memberikan dampak yang besar kepada kesehatan kita, seperti timbulnya penyakit kanker pada tubuh. Oleh karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dan teliti dalam membeli produk-produk kebutuhan mereka, khususnya produk-produk makanan yang dijual di Kota Pekanbaru ini.

³ <http://eprints.umm.ac.id/37720/2/jiptummpg-gdl-elianadama-47910-pdf> diunduh pada Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, pukul 11. 53 WIB.

⁴ Kementerian Agama, *Op.Cit.*, Hlm. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang diterapkan dalam proses produksi atas barang dan jasa, maka timbul suatu masalah bagi konsumen, karena mereka memiliki keterbatasan untuk mengetahui kebenaran informasi yang ada pada produk yang akan digunakannya. Informasi yang dimaksud adalah mengenai kebenaran terhadap bahan-bahan dari produk hingga pengemasan yang mana tidak dibenarkan oleh hukum agama Islam. Jadi, secara mutlak harus ada informasi yang jelas atas kehalalan terhadap suatu produk yang bersangkutan agar mudah dipahami oleh konsumen sehingga tidak ada keraguan terhadap produk-produk yang dikonsumsi.

Label merupakan alat penyampaian informasi tentang produk yang tercantum pada kemasan. Selain memberikan informasi mengenai nama produk, label juga memberikan informasi daftar bahan yang terkandung dalam produk, bersifat bersih, dayatahan, nilai gizi ataupun kegunaan produk serta keterangan tentang halal. Produk halal adalah semua jenis produk yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram menurut hukum Islam tak terkecuali pada produk-produk makanan.

Dalam kegiatan produksi dan perdagangan produk pangan dan non-pangan di era globalisasi, masyarakat yang mengkonsumsi khususnya umat Islam, perlu diberikan pengetahuan, informasi dan akses yang memadai agar memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan tentang status kehalalan produk yang dibelinya. Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat muslim khususnya terhadap kepastian kehalalan produk makanan, maka LP POM MUI mengeluarkan instrumen sertifikat halal bagi setiap produsen yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi atau pemerintah yang berwenang.⁵

Sertifikat halal pada produk makanan yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat merupakan salah satu upaya perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat secara umum. Masalah kehalalan bukan diteliti dari bahannya semata, tetapi juga dari proses pengolahan yang bercampur dengan aneka bahan tambahan hingga tahap pengemasan yang masih kritis tercampur dengan bahan-bahan tidak halal. Dalam hal inilah diperlukan label halal yang terpercaya, yang dapat memberikan ketentraman bagi konsumen untuk mengonsumsi makanan halal.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sebagian besar menganut ajaran agama Islam. Dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, maka sudah sewajarnya hak-hak mereka sebagai konsumen mendapatkan perhatian khusus dari berbagai perundang-undangan.

Negara Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang tentang perlindungan konsumen, yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) huruf h mengatur bahwa "*Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak*

⁵ <http://digilib.uinsby.ac.id/12852/4/BAB%201.pdf> diunduh Sabtu, tanggal 29 Agustus 2024, pukul 15.57 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label".⁶ Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Selanjutnya, pada pasal yang sama huruf c disebutkan bahwa "*Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa*". Hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang diberikan oleh pelaku usaha haruslah benar, atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian pelaku usaha tidak dapat dengan serta merta mengklaim bahwa produknya halal sebelum melalui pengujian kehalalan dari lembaga yang berwenang. Sehingga tidak ada kerugian bagi umat Islam untuk mengonsumsi produk yang berlabel halal.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa "Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Sidang Fatwa Halal".⁸

Maka kedudukan *fiqih siyasah* di dalam sistematika hukum Islam menurut Dr. Wahbah al- Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia.

⁶ Pasal 8 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ *Ibid.*, Pasal 8 Ayat (1) Huruf c.

⁸ Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Hubungan manusia dengan Tuhan-Nya; 2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; 3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Hal ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan kahirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadaluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib dilakukann, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.⁹

Oleh karena itu, Indonesia mengatur mengenai sertifikasi halal dengan tujuan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru merupakan suatu lembaga yang berwenang dalam memberikan izin usaha dan pengawasan terhadap produk-produk khususnya makanan yang sudah memiliki label halal ataupun yang tidak memiliki label halal. Untuk mendapatkan izin usaha pada produk makanan khususnya UMKM harus memiliki syarat label halal dari MUI karena hal tersebut sangatlah penting bagi konsumen. Berikut data UMKM pada produk makanan di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 :

⁹ <https://journal.uir.ac.id/Millah/article/download/8412/7327> diunduh Kamis, tanggal 10 September 2020, pukul 21.23 WIB.

Tabel. I. 1

Jumlah UMKM jenis Kuliner di Pekanbaru tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Usaha	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah
1	Marpoyan Damai	Kuliner	297	29	0	326
2	Payung Sekaki	Kuliner	1419	350	0	1769
3	Tenayan Raya	Kuliner	216	97	6	319
4	Rumbai	Kuliner	102	28	0	130
5	Rumbai Pesisir	Kuliner	296	18	0	314
6	Sail	Kuliner	105	18	0	123
7	Tampan	Kuliner	345	56	0	401
8	Senapelan	Kuliner	250	31	0	281
9	Sukajadi	Kuliner	250	14	0	264
10	Bukit Raya	Kuliner	300	25	4	329
11	Lima Puluh	Kuliner	150	30	0	180
12	Pekanbaru Kota	Kuliner	180	25	4	209
TOTAL			3910	721	14	4645

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, (2021).

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah UMKM produk makanan/kuliner pada tahun 2020 yang terbanyak adalah terdapat pada Kecamatan Payung Sekaki. Dari jumlah 4.645 total UMKM produk makanan/kuliner hanya 27 pengusaha kuliner yang memiliki syarat label halal dan yang tidak memiliki syarat label halal berjumlah 4. 618, hal ini dikarenakan rumitnya pengurusan pada proses pembuatan sertifikasi halal.

Berikut wawancara penulis dengan pengusaha UMKM, Shella Wulandari (Nyonya Boss) beliau mengatakan bahwa :

“Ribet sih, syaratnya bukan banyak lagi, bolak baliknya, terus satu makanan tu harus satu pula label halalnya, harus satu-satu pulak nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halalnya, sedangkan kita kan banyak jenis makanannya. Nah itu harus berapa kali bolak balik. Terus lama juga keluarnya, gitu sih.”¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun sebuah tugas akhir dengan judul **“Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UMKM Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UMKM khususnya pada produk makanan di Kota Pekanbaru menurut pandangan *fiqih siyasah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk halal UMKM oleh Dinas Koperasi ?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UMKM di Kota Pekanbaru menurut pandangan fiqih siyasah ?

¹⁰ Shella Wulandari, Pengusaha UMKM (Nyonya Boss) “Wawancara” Sabtu, tanggal 03 April 2021, pukul 16.00 – Selesai.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk halal UMKM oleh Dinas Koperasi.
- b. Mengetahui bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UMKM di Kota Pekanbaru menurut pandangan fiqih siyasah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah pengawasan sertifikasi halal terhadap produk UMKM oleh Dinas Koperasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UMKM di Kota Pekanbaru.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (siyasah), terutama yang berkaitan dengan pengawasan sertifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halal terhadap produk UMKM oleh Dinas Koperasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UMKM di Kota Pekanbaru.

- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana pengawasan sertifikasi halal terhadap produk UMKM oleh Dinas Koperasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UMKM di Kota Pekanbaru.
- 3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan keterangan yang jelas tentang pengawasan sertifikasi halal terhadap produk UMKM oleh Dinas Koperasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UMKM di Kota Pekanbaru.

c. Secara Akademis

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).
2. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (siyasah).
3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan sabar dan hati-hati, terencana, sistematis, atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan. Untuk Memperoleh hasil penelitian yang baik dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian sosiologis hukum dengan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data primer dengan melalui observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder data yang didapatkan langsung dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi yang dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut karena lokasinya mudah dijangkau oleh penulis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UMKM di Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, khusus-khusus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹¹ Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan 3 orang pengusaha UMKM Kota Pekanbaru.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah mendalam.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*¹². Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu pihak Dinas Koperasi dan

¹¹ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2012), Hlm. II.6.

¹² Sandu Siyota & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UMKM Kota Pekanbaru yang terkait dengan pengawasan sertifikasi halal yaitu Pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

- b. Data Sekunder, adalah data yang melengkapi data primer yang didapat dari pihak pengusaha produk makanan UMKM berjumlah 3 pengusaha UMKM yang diambil dari data UMKM terbanyak di Kota Pekanbaru yaitu di Kecamatan Payung Sekaki. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi penjelasan atas masalah yang diteliti.¹³
- c. Data Tersier, adalah data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini, data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.
- b. Wawancara, adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka.
- c. Dokumentasi, adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu¹⁴.

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rajawali Persada, 2008), Hlm. 30.

¹⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), Hlm. 79-83.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.¹⁵

8. Teknik Penulisan Data

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak dan sebagainya.
- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Teknik deduktif itu sendiri digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.¹⁶

¹⁵ Sandu Siyota & Ali Sodik, *Op.Cit.*, Hlm. 99.

¹⁶ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta CV, 2014), Hlm.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum yang berisikan tentang uraian Profil Singkat Dinas Koperasi dan UMKM yang terdiri dari Pengertian UMKM, Sejarah Singkat Dinas Koperasi dan UMKM, Visi, Misi, Struktur Organisasi, Bidang-bidang Kerja Kepegawaian Dinas Koperasi dan UMKM, Aktivitas Dinas Koperasi dan UMKM, dan Bagan Susunan Dinas Koperasi dan UMKM.

Bab ketiga merupakan tinjauan teoritis yang berisikan tentang uraian Tinjauan Tentang Pengertian Produk Halal, Pengertian Sertifikasi, Sejarah Singkat dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pengertian Fiqih Siyasah, Ruang Lingkup Fiqih Siyasah dan Peran Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Islam.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang Bagaimana Cara Pengawasan Sertifikasi Halal Oleh Dinas Koperasi dan Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UMKM Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

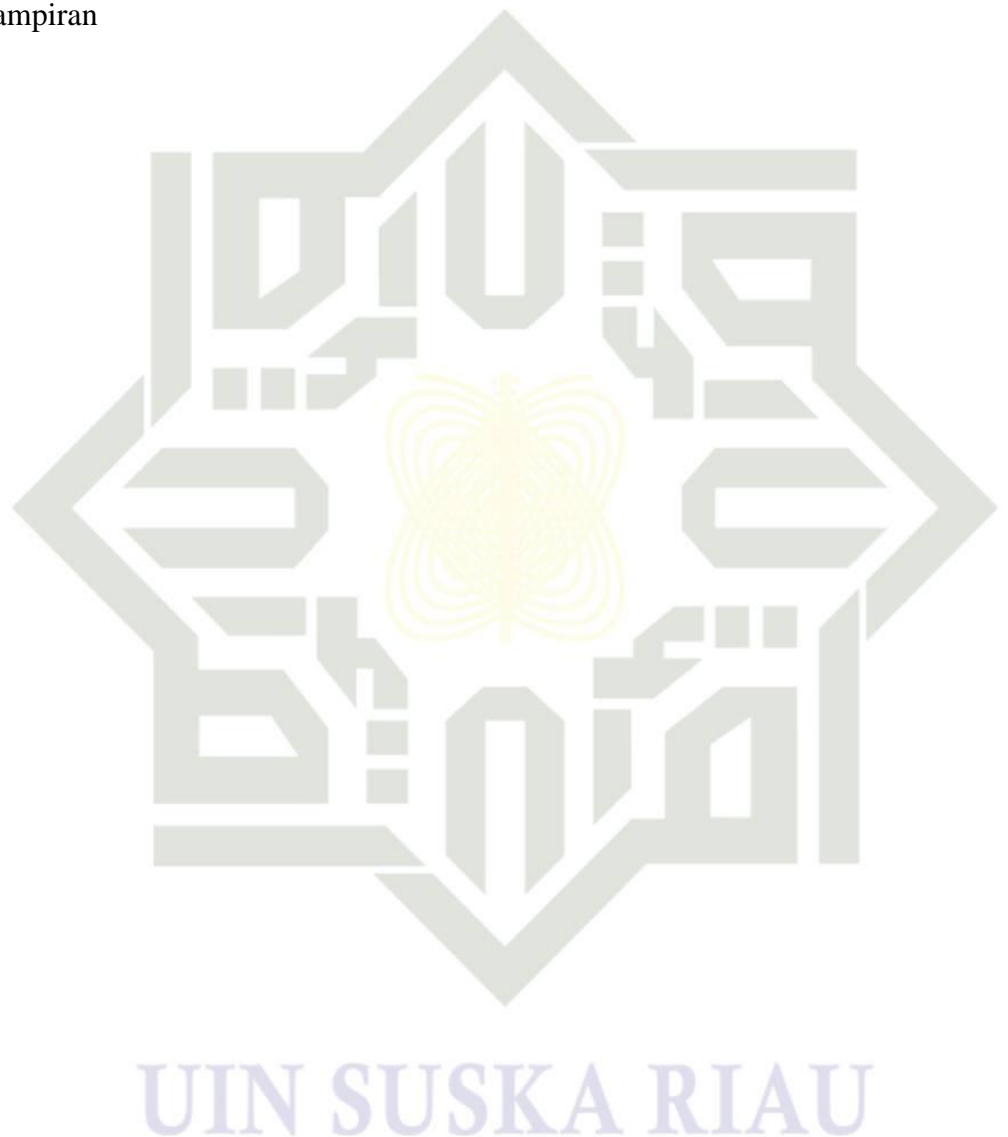
Bab kelima ini merupakan bab penutup, dimana penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PEKANBARU

A. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah “ Kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. ”

Kriteria UMKM menurut UU No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah ataupun Besar.
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.¹⁷

¹⁷ Lilis, Sulastri, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, (LGM : LaGood's Publishing, 2016), Hlm.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam krisis ekonomi yang terjadi dinegara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami penurunan bahkan berhenti aktivitasnya, sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Jadi, pemerintah sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM dinegara ini, yaitu perlunya meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).¹⁸

B. Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor. 598/KP/IX/1979 tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1979, pada tanggal 3 Januari 1981 oleh Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan melantik Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 124/KP/IV/1980 dalam suatu upacara resmi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 355/KP/IX/1980 pada tanggal 8 September 1980. Klasifikasi Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah memakai type B.

Pada mulanya Dinas Koperasi dan UMKM terletak di Jalan Setia Budi No 27 pada tanggal 7 Oktober pindah dan sampai sekarang menempati gedung

¹⁸ Ibid., Hlm.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Jumlah personal yang ada di Dinas Koperasi kenyataannya berjumlah 32 orang dari tahun 1993. Mengenai jumlah pegawai yang ada serta tahun perkembangannya dalam tahun 1991 berjumlah 36 orang pegawai yang ada, serta tahun 1993 ternyata penurunan jumlah pegawai yang ada termasuk unsur pimpinan serta bawahannya.¹⁹

Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Kota Pekanbaru yang baru- sekarang berada di jalan Teratai No. 83, Kecamatan Sukajadi, dan pada tahun 2007 - 2011 Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dibangun baru, karena Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru yang lama tidak layak lagi untuk dipakai, maka dibangun Kantor yang baru oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan sekarang dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru berada satu atap dengan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag).

Dalam rangka hari koperasi ke-68 Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan penghargaan kepada 12 koperasi terbaik dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Perkoperasian di Pekanbaru saat ini sudah mulai menunjukkan jati dirinya dalam mensukseskan pembangunan. Penghargaan kepada 12 koperasi ini diserahkan oleh Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST. MT didampingi Wakil Wali Kota Ayat

¹⁹ <http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/127110595/bab1.pdf> diunduh Rabu, tanggal 10 Maret 2021, pukul 21.42 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cahyadi, pada upacara hari koperasi ke-68 di halaman kantor wali kota. Salah satu koperasi yang menerima penghargaan adalah Koperasi Serba Usaha (KSU), Kioperasi Rejosari, Indofood Sukses Makmur, Primkopau Skatek, Ahanudse Den Bek Ang, Yan Kesyah, Sang Surya, Kopwan Nurul Iman dan Koperasi Karya Mandiri.²⁰

C. Visi, Misi dan Rincian Tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang khusus menangani urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga secara garis besar terdapat dua bidang yaitu Koperasi dan UMKM. Adapun Visi dan Misinya yaitu :

1. Visi

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah “ Terciptanya Usaha Kecil dan Menengah sebagai pelaku kegiatan ekonomi kerakyatan Di Kota Pekanbaru berbasis Mekanisme Pasar yang Berkeadilan. ”

2. Misi

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru maka ditetapkanlah misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, yaitu :

²⁰*Ibid.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjaga agar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tetap tumbuh dan berkembang dalam system perekonomian masyarakat, sehingga eksistensi dan peranannya semakin berarti.
- b. Meningkatkan profesionalisme para pengurus Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga mampu mengelola usaha menunjukkan perkembangan positif dan memberikan nilai tambah.
- c. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif sehingga Koperasi dan Usaha Kecil Menengah lebih tepat sasaran. Sehingga volume kegiatan usaha menunjukkan perkembangan positif dan memberikan nilai tambah.
- d. Menciptakan landasan yang kuat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pelaku utama kegiatan kerakyatan yang memberikan jaminan kehidupan masa depan yang layak.²¹

Adapun rincian tugas Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- c. Membina dan melaksanakan urusan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

²¹ Sumber data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- e. Membina unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²²

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Bidang Promosi dan Pengembang Usaha Sarana dan Prasarana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 108 Tahun 2016, yaitu :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan rencana dan program operasional pembinaan Koperasi dan UMKM.
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan pedoman penyuluhan tentang kebijakan kelembagaan Koperasi dan UMKM berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan.
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan / pelaksanaan perkembangan pembinaan Koperasi dan UMKM.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan laporan dan penyajian keragaan Koperasi dan UMKM.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan evaluasi hasil telaah permohonan bantuan untuk pengembangan Koperasi dan UMKM.
- f. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas Bidang Promosi dan Pengembangan Sarana Prasarana Koperasi dan UMKM.

²² *Ibid.*,

- g. Pengkoordinasian terhadap Koperasi dan UMKM dalam mempromosikan produknya.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.²³

D. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjuk segenap tugas pekerjaan, hubungan, aktifitas, fungsi-fungsi dan tujuan lain dari struktur organisasi adalah untuk menambah jalur informasi dan pengawasan dari tiap-tiap bagian yang berhubungan dengan tujuan organisasi perusahaan.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sesuai dengan keputusan peraturan walikota pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretaris, yang membawahi :**
 - a. Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang kelembagaan, yang membawahi :**
 - a. Seksi Legalitas dan Perizinan;
 - b. Seksi Pendataan; dan
 - c. Seksi Akuntabilitas.

²³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bidang Promosi, Pengembangan Usaha Dan Sarana Prasarana, yang membawahi :

- a. Seksi Promosi;
- b. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi; dan
- c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

5. Bidang Fasilitas Pengawasan Dan Pengembangan Kapasitas, yang membawahi :

- a. Seksi Fasilitas Pembiayaan Jasa Keuangan;
- b. Seksi Pengawasan; dan
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas.²⁴

E. Bidang-bidang Kerja Kependidikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas

Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

²⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas; dan
- g. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁵

2. Sekretaris

Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- g. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁶

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan

Yaitu, perencanaan program kerja sub bagian umum (kepegawaian, umum, perlengkapan), penyelenggaraan pelayanan administrasi sub bagian umum (Kepengawaian, Umum, dan Perlengkapan), pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum (Kepengawaian, Umum dan Perlengkapan), pelaksanaan tugas-tugas lain.

b. Sub Bagian Keuangan

Yaitu, pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan rencana program, penyiapan rencanaprogram kelembagaan, penjabaran kebijakan dan petunjuk teknis, pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), penyiapan kerja sama dengan unit kerja lain dan instansi terkait, penyiapan perumusan pembinaan evaluasi bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta mengevaluasi kegiatan kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), penyajian data keragaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pelaksanaan tugas-tugas lain.²⁷

3. Bidang Kelembagaan

Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana dan program kerja bidang;
- b. Penyusunan petunjuk operasional pembinaan kelembagaan Koperasi dan UMKM;

²⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan proses pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran badan hukum koperasi;
- d. Melakukan penilaian bidang kelembagaan Koperasi dan UMKM;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan UMKM;
- f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁸

Sub Bagian, yaitu :

a. Seksi Legalitas dan Perizinan

Yaitu, penyiapan bahan dan peralatan kerja, perumusan pedoman terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), penyusunan penyajian keragaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pelaksanaan pemberian serta meneliti permohonan pengesahan badan hukum koperasi dan perubahan anggaran dasar Koperasi, perizinan Usaha Kecil Menengah (UKM), monitoring dan evaluasi tentang kelembagaan Koperasi, pembinaan rapat anggota Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pelaksanaan tugas lain-lain.

b. Seksi Pendataan

Yaitu, penyiapan bahan dan peralatan kerja, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas, pelaksanaan kegiatan pendataan dalam rangka

²⁸ *Ibid.*,

pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pelaksanaan kegiatan pendataan dalam rangka penyediaan data KUMKM secara akurat, pelaksanaan tugas lain-lain.

c. Seksi Akuntabilitas

Yaitu, penyiapan bahan dan peralatan kerja, pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), penjabaran kebijakan teknis kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pelaksanaan tugas-tugas lain.²⁹

4. Bidang Promosi, Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana

Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan rencana dan program operasional pembinaan Koperasi dan UMKM;
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan pedoman penyuluhan tentang kebijaksanaan kelembagaan koperasi, UMKM berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan/pelaksanaan perkembangan pembinaan koperasi dan UMKM;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan laporan dan penyajian keragaan koperasi dan UMKM;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan evaluasi hasil telaahan permohonan bantuan untuk pengembangan koperasi dan UMKM;

²⁹ *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas Bidang Promosi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM;
- g. Pengkoordinasian terhadap Koperasi dan UMKM dalam mempromosikan produknya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.³⁰

Sub Bagian, yaitu :

a. Seksi Promosi

Yaitu, penyusuna program kerja, penyuluhan, penyajian keragaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bidang promosi, petunjuk teknis pembinaan usaha dan kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pemberian rekomendasi Usaha Kecil Menengah (UKM), analisa dan evaluasi laporan kegiatan kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), memfasilitasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mempromosikan produknya, pelaksanaan tugas lain-lain.

b. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi

Yaitu, penyusunan program kerja, penyusunan rencana dan program pengembangan usaha dan investasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), penyusunan dan penyajian keragaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pemberian

³⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekomendasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pelaksanaan tugas lain-lain.

c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

Yaitu, penyiapan bahan dan peralatan kerja, penyusunan program kerja, penyediaan sarana dan prasarana yang berbasis IT bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengkoordinasian dengan unit kerja lain, penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah, penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pemimpin, pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas-tugas lain.³¹

5. Bidang Fasilitas Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas

Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan dan perumusan pengumpulan data serta mengolah, menganalisa, menyajikan dan menyusun laporan program pembiayaan dan jasa keuangan koperasi dan UMKM.
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengumpulan data serta mengolah dan menganalisa, menyajikan dan menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabi serta metode pelatihan dan penyuluhan koperasi dan UMKM mempersiapkan pelaksanaan tugas pelatihan dan penyuluhan menetapkan materi sasaran pelatihan, konsultasi dan kerjasama pelatihan.

³¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pembiayaan dan jasa keuangan koperasi dan UMKM.
- d. Pembinaan, pedoman penyuluhan usaha dan kelembagaan serta mengevaluasi hasil penelaahan tentang permohonan bantuan untuk pengembangan koperasi dan UMKM.
- e. Monitoring pelaksanaan perkembangan program pembiayaan dan jasa keuangan.
- f. Pengkordinasian, pembinaan dan perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dari instansi terkait yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- g. Pengkordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.
- h. Pengkordinasian, pembinaan dan perumusan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- i. Pengkordinasian, pembinaan dan perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabi serta metode pelatihan dan penyuluhan bagi KUMKM.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³²

³² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Bagian, yaitu :

a. Seksi Fasilitas Pembiayaan Jasa Keuangan

Yaitu, penyusunan program kerja, menyiapkan bahan dan peralatan kerja, perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program, menyiapkan penyusunan dan penyajian perangkat, petunjuk teknis pembinaan, memfasilitasi akses permodalan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), monitoring berkala Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) penerima dana permodalan oleh BUMN/BUMD/Lembaga keuangan, pelaksanaan tugas-tugas lain.

b. Seksi Pengawasan

Yaitu, penyusunan program kerja, menyiapkan bahan dan peralatan kerja, perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program, perumusan dan penyusunan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengawasan permodalan dan investasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pelayanan umum, pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya, penginventarian permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah, penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan laporan, pelaksanaan tugas-tugas lain.

c. Seksi Pengembangan Kapasitas

Yaitu, pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengumpulan data serta mengolah dan menganalisa, menyajikan dan menyusun rencana kegiatan, penyusunan rencana dan program pelatihan dan identifikasi kebutuhan pelatihan dan penyuluhan, penyiapan program pelatihan dan penyuluhan, jadwal pelatihan dan penyuluhan, pedoman, perlengkapan, sertifikasi dan dokumentasi pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), penyiapan bahan dan peralatan kerja, pelaksanaan evaluasi dan laporan terhadap program pelatihan, pelaksanaan pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pelaksanaan pelayanan umum, pelaksanaan tugas-tugas lain.³³

F. Aktivitas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Aktivitas para pegawai di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru ini sangat berbeda, semua itu tergantung pada bagian yang mereka jabati. Berikut akan dijelaskan sebgaiian besar aktivtas di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Pekanbaru serta pelayanan hukum.

³³ Ibid.,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

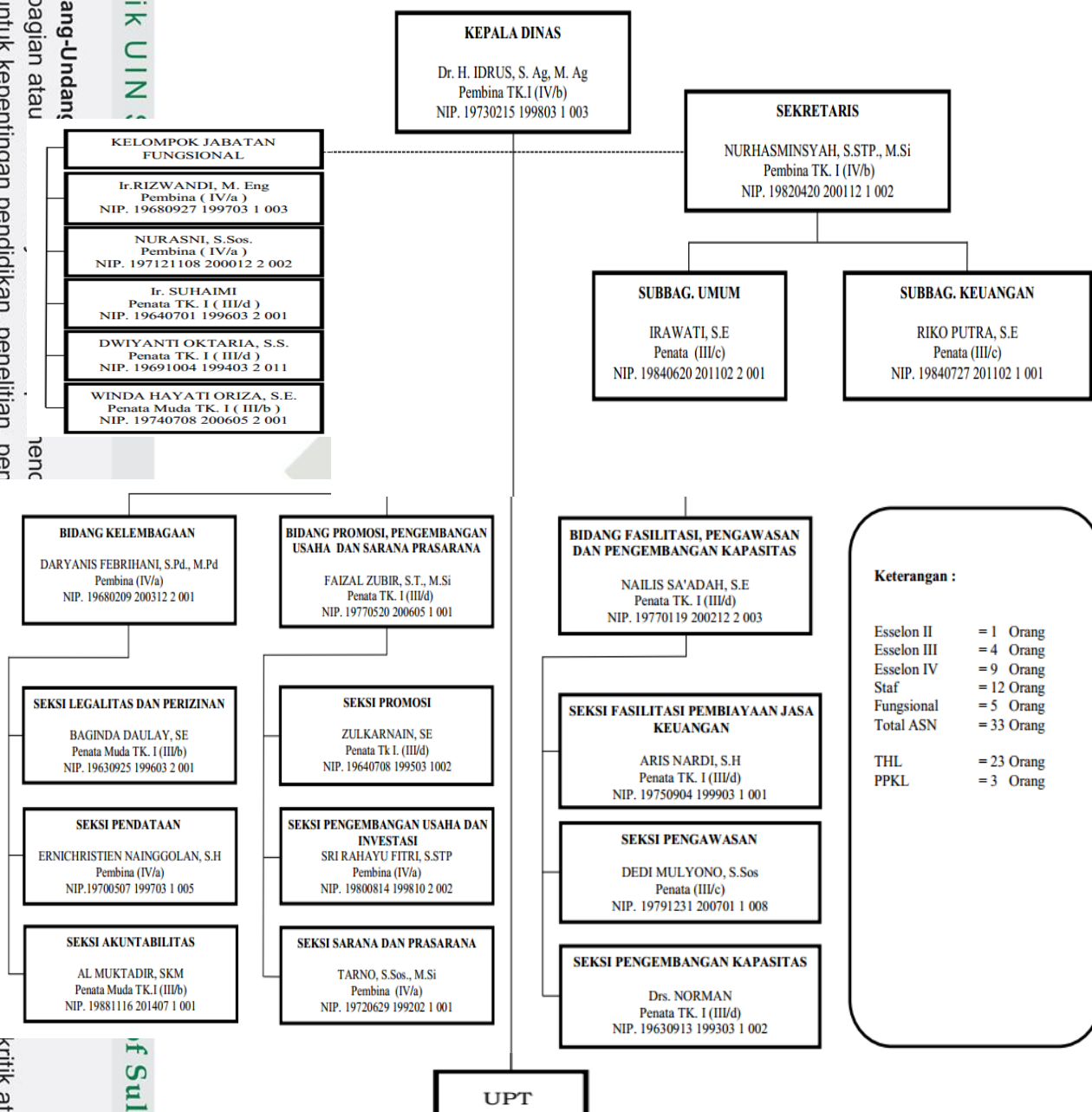
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, menyusun program tahunan dan laporan serta pencatatan izin usaha dan program pengendalian lingkungan.
3. Membuat petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan di bidang Usaha Koperasi.
4. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Koperasi.
5. Memberikan bimbingan teknis pembinaan usaha sarana perdagangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis usaha Koperasi.
6. Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan masing- masing, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.³⁴

³⁴ *Ibid.*,

G. Bagan Susunan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKANBARU



kritik atau tinjauan suatu masalah.

of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Produk Halal

Dizaman modern sekarang ini, usaha di bidang produksi telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan produksi itu selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran baru terkait kualitas produk jika ditinjau dari aspek kehalalannya.

Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram.

Dalam perspektif Islam, ketentuan halal haram adalah hak Allah SWT yang diwujudkan melalui pengamalan syari'at-Nya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena itu mengetahui ukuran halal-haram menurut syari'at-Nya merupakan keniscayaan dalam perlindungan konsumen.

Pada prinsipnya semua bahan makanan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu bangkai,³⁵ darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat : 173 yang berbunyi :

³⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Seriifikasi Halal*, (UIN-Ma'ki Press, 2011), Hlm. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Q.S Al- Baqarah [2]:173).”³⁶

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwasanya tidak boleh memakan makanan yang sudah diharamkan dalam Islam dan makanan-makanan haram tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi apabila seseorang dalam keadaan terpaksa, tanpa ada niat untuk mengkonsumsi yang melampaui batas.

Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas, dan penyembelihannya diperuntukkan bagi berhalal.

Jadi, berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari’at Islam yaitu :

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah kotoran-kotoran dan sebagainya;
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari’at Islam;

³⁶ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, Hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan³⁷ untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam; dan
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

B. Pengertian Sertifikasi

Bahan-bahan yang termasuk kedalam kategori halal , setelah diolah secara baik sesuai ketentuan, produknya dapat diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obat dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.

Berdasarkan uraian di atas, sertifikasi halal itu adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan suatu produk dari instansi pemerintah yang berwenang.³⁸ Namun, ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi halal.

Pemegang sertifikasi halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak bisa

³⁷ Burhanuddin, *Op.Cit.*, Hlm. 140.

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipindahtangankan. Masa berlaku sertifikasi halal adalah 2 tahun, yang selanjutnya dapat diperbaharui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk foto copy-nya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.³⁹

C. Sejarah dan Penjelasan Tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Jadi, sudah sewajarnya setiap produk-produk yang dipasarkan memiliki kejelasan tentang kehalalan suatu produk tersebut, salah satu yang terpenting adalah produk makanan . Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi Indonesia dalam menyediakan produk-produk didalam negeri yang tersertifikasi halal. Hal ini dilakukan agar terwujudnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat terutama muslim dalam menggunakan suatu produk tersebut.

Kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sangatlah penting, maka dibuatlah undang-undang dan peraturan lainnya mengenai sertifikasi halal salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 25 September Tahun 2014. Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan

³⁹ Ibid., Hlm. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh Presiden RI Ke-6 Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 17 Oktober Tahun 2014. Pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Amir Syamsudin telah mengundangkan Undang-Undang tersebut sebagai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Dalam Undang-Undang yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, seperti yang disebutkan pada pasal 4. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menurut Undang-Undang ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Selain BPJPH, pada UU JPH tersebut juga mengatur tentang peran dan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sertifikasi halal, juga peran Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) yang memeriksa dan/atau menguji kehalalan suatu produk, seperti yang disebutkan pada pasal 1 ayat 8.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini berlaku lima tahun sejak ditetapkan pada tanggal 17 Oktober Tahun 2014, seperti yang disebutkan pada pasal 67 ayat 1. Selain itu, terdapat juga ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sertifikasi halal di Indonesia.⁴⁰

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

D. Pengertian Fiqih Siyasah

Istilah *fiqih siyasah* terdiri atas dua kata, yaitu *fiqih* dan *siyasah*. Kata *fiqih* berarti tahu, paham, dan mengerti. Fiqih adalah istilah yang dipakai dalam konsep hukum Islam.⁴¹ Jadi, fiqih secara bahasa artinya paham yang mendalam. Sedangkan secara istilah fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat *amaliyah*, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Fiqih juga disebut dengan hukum Islam, karena bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terdapat hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁴²

Sedangkan *siyasah* diartikan sebagai politik.⁴³ Kata *siyasah* secara bahasa berasal dari kata *sasa yasusu sayasatan* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari *siyasah* adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁴⁴

Sedangkan secara istilah, *fiqih siyasah* ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum dimana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama *mujtahid fiqh siyasah* ini tetap menggunakan sumber hukum Islam

⁴¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), Hlm 13.

⁴² Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh siyasah*, (Jawa Tengah : PT. Nasya Expanding Managenent, 2019, cet. 1), Hlm. 6.

⁴³ Jubair, Situmorang, *Op.Cit.*, Hlm. 16.

⁴⁴ Muhammad, Ramadhan, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berupa Al-Qur'an dan Hadist untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁵

Jadi, *fiqih siyasah* merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁴⁶

E. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian *fiqih siyasah*. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan. Dari perbedaan pendapat tersebut, maka pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyah* disebut juga politik perundang-undangan, yang mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siyasah Dauliyah* disebut juga politik luar negeri, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan perang, dan gencatan senjata.

3. *Siyasah Maliyah* disebut juga politik keuangan dan moneter, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Bagian ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁴⁷

F. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah *fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.⁴⁸ Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁹

⁴⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana, Prenada Media Group, 2003), Hlm. 3.

⁴⁸ Jubair Situmorang, *Op.Cit.*, Hlm. 20

⁴⁹ Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 177.

G. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Hal yang paling penting dalam kajiannya *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan⁵⁰ kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Siyasah dusturiyah adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Objek kajian dalam *siyasah dusturiyah* ini adalah sebagai berikut :

1. Kajian tentang konsep *imamah, khalifah, imarah, mamlakah*, serta hak dan kewajibannya;
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
3. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
4. Kajian tentang *Waliul Ahdi*;
5. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
6. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
7. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
8. Kajian tentang pemilihan umum.⁵¹

Dalam *siyasah dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan system pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu.⁵²

⁵⁰ Jubair Situmorang, *Op.Cit.*, Hlm. 22.

⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 23.

⁵² *Ibid.*, Hlm. 24.

H. Peran Pemimpin Dalam Islam

Sebagai negara dengan berpenduduk beragama Islam terbesar di dunia secara otomatis Al-Qur'an merupakan kitab suci yang paling berpengaruh. Dalam pengertian banyak dijadikan rujukan dan landasan argumentatif oleh orang-orang Islam dalam pengambilan suatu keputusan baik hukum maupun moral.⁵³

Kepemimpinan dalam Al-Qur'an terdapat empat kata, yaitu *Khalifah, Imam, Wali dan Ulul Amri*. Berdasarkan konteks bahasa, kata *khalifah* yang secara jelas mengarah pada makna kepemimpinan dalam arti orang yang mengatur dan menegakkan hukum.⁵⁴

Menurut al-Mawardi untuk menentukan pilihan terhadap pemimpin umat harus memiliki tujuh syarat untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu :

1. Adil.

Seorang pemimpin harus mampu berbuat adil pada siapapun dan dalam kondisi apapun.

2. Memiliki Ilmu Pengetahuan.

Seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan agar mampun berfikir dan berijtihad ketika menghadapi persoalan ataupun membuat hukum.

3. Anggota Tubuh Harus Sempurna.

Seorang pemimpin harus memiliki anggota tubuh yang sempurna, tidak boleh cacat dan kekurangan fisik, seperti tidak buta, tidak tuli, fasih berbicara, dan lain-lain.

⁵³ Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, (Kalimantan Barat : Ayunindya, 2018), Hlm. 4.

⁵⁴ *Ibid.*, Hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Tidak ada kekurangan dalam anggota tubuhnya yang bisa menghalanginya untuk bergerak dan bertindak.
5. Memiliki Visi dan Misi.
Seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi yang baik sehingga kebijakannya berorientasi pada kepentingan rakyat dan mampu mewujudkan kemaslahatan.⁵⁵
6. Memiliki Keberanian.
Seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk menjaga dan mempertahankan rakyatnya untuk menghadapi serangan dari musuh.
7. Pemimpin harus memiliki nasab dari suku *Quraisy*.

Sementara itu Imam al-Ghazal membuat sepuluh persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, yaitu :

1. *Baligh* atau sudah dewasa.
2. Berakal sehat atau tidak gila.
3. Statusnya merdeka, bukan budak.
4. Laki-laki.
5. Keturunan suku *Quraisy*.
6. Pendengaran dan penglihatannya masih jelas.
7. Memiliki perangkat yang memadai, termasuk angkatan bersenjata ataupun kepolisian sebagai petugas keamanan.
8. Pikirannya sudah matang dan emosinya terkendali, sehingga pada saat musyawarah dia bisa mendengarkan pendapat dan nasehat orang lain.
9. Memiliki ilmu pengetahuan.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Memiliki sifart *wara'*, yaitu mampu mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan⁵⁶ terlarang. Memiliki sifat kehati-hatian dalam melakukan sesuatu, tidak gegabah dan mengerti akan resiko sesuatu.

Tidak jauh dengan Imam al-Ghazali, Ibn Khaldun juga membuat kriteria pemimpin. Menurutnya seorang pemimpin negara harus memenuhi lima syarat, yaitu :

1. Memiliki ilmu pengetahuan, karena melalui ilmu itu seseorang pemimpin dapat melaksanakan hukum Allah dan mampu membuat keputusan.
2. Memiliki kesanggupan dan kemampuan dalam menjalankan hukum yang telah ditetapkan undang-undang.
3. Mampu berlaku adil.
4. Panca indranya sehat.
5. Keturunan *Quraisy*.⁵⁷

Adapun beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang telah disepakai oleh beberapa ulama yaitu :

- a. Integritas.

Dalam hal kepemimpinan, ada empat sifat wajib Rasulullah Saw yang merupakan pencerminan karakter beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat, yaitu *Shiddi, Amanah, Tabligh, dan Fhatanah*.⁵⁸

- b. Bersikap Adil.

Adil merupakan kriteria universal yang akan berlaku hingga kapanpun bagi setiap pemimpin.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 50.

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm. 51.

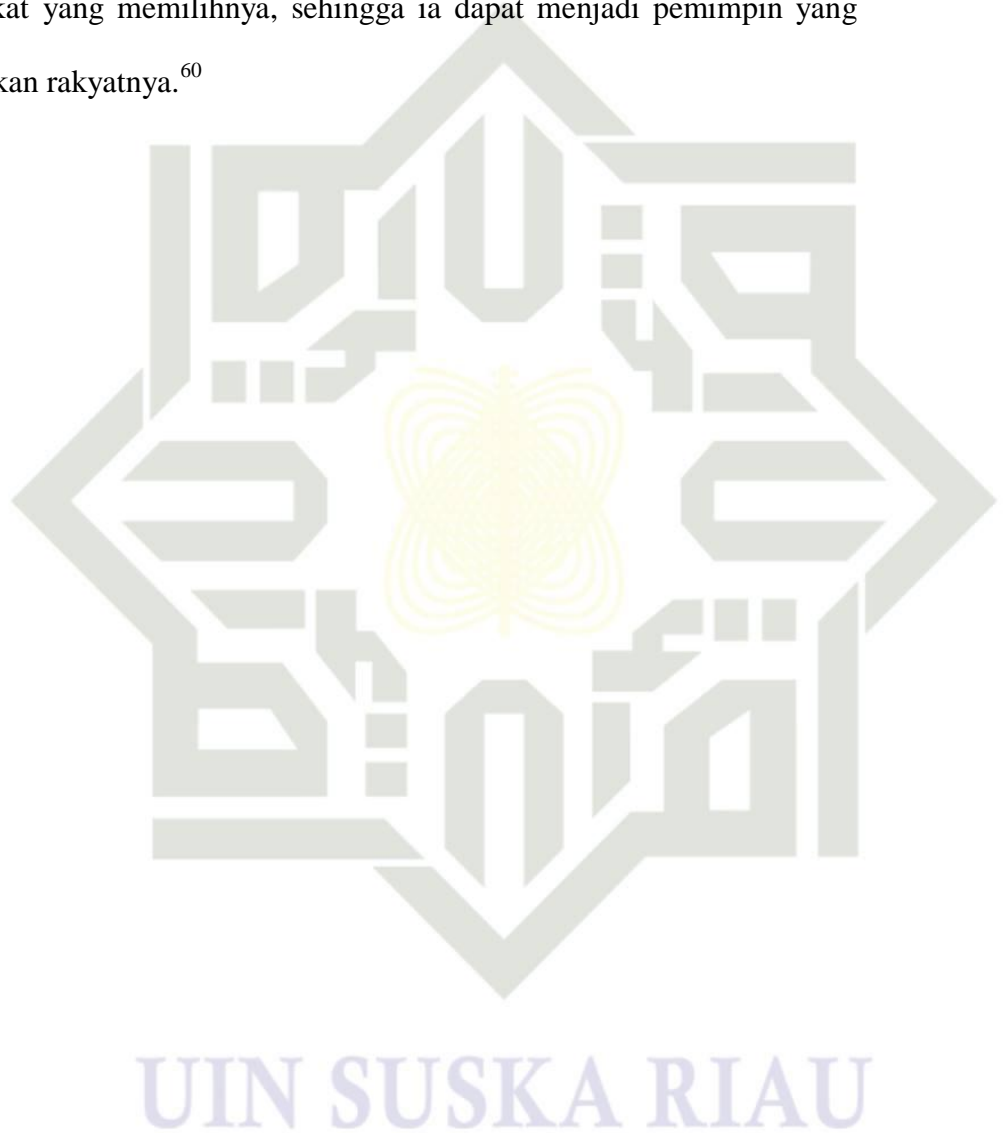
⁵⁸ *Ibid.*, Hlm. 54-61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Memiliki Kemampuan.

Mencalonkan diri sebagai pemimpin negara maupun pemimpin daerah merupakan hak setiap warga negara. Namun demikian, setiap individu sudah seharusnya mengukur kemampuan dirinya dalam memimpin masyarakat yang memilihnya, sehingga ia dapat menjadi pemimpin yang diharapkan rakyatnya.⁶⁰



⁵⁹ *Ibid.*, Hlm. 62.

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. 66.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti terkait penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru masih belum mendapat hasil yang maksimal, dimana tugas dinas tersebut adalah memberikan izin usaha kepada masyarakat serta mengawasi produk-produk UMKM yang sudah memiliki ataupun yang belum memiliki label halal. Dalam hal ini, untuk mendapatkan izin usaha masih ada yang tidak memerlukan syarat sertifikasi halal dari MUI. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru mengambil suatu kebijakan bahwa syarat sertifikasi halal dari MUI dalam membuat izin usaha tidak diwajibkan, karena pengurusannya sangat rumit, seperti pengurusan untuk halal itu di bayar, harus ada PIRTnya (Perizinan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan, dan harus mengikuti penyuluhan untuk bisa ngurus PIRT tersebut. Kemudian untuk jangka waktu keluar sertifikasi halal itu cukup lama.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru ditinjau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut *fiqih siyasah* dalam hal ini *siyasah dusturiyah*. Menurut penulis aturan akan jaminan produk halal tersebut sudah diterapkan dan dijalankan sesuai dengan kaidah tersebut yang mementingkan kemaslahatan masyarakat. Walaupun belum sepenuhnya diterapkan dan terdapat banyak kendala serta keluhan dari berbagai pihak, maka hal tersebut seharusnya tidak mengganggu kinerja dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru untuk bisa menjadi acuan menentukan jaminan produk tersebut halal karena sudah diawasi dan dicek oleh mereka.s

B. Saran

Mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru untuk izin usaha yang tidak memerlukan syarat label halal suatu produk masih kurang bisa menjamin keamanan untuk dikonsumsi masyarakat. Maka penulis, dalam penelitian ini memberikan saran yaitu :

1. Di dalam penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru seharusnya menerapkan undang-undang tersebut, yang mana kehalalan suatu produk sangat menjamin kualitas produk untuk keamanan masyarakat, serta masalah penyuluhan yang hanya pernah dilakukan sekali saja, dan untuk pengurusan label halalnya yang sangat rumit sekali dalam hal prosedur yang harus dilakukan.

2. Diharapkan kepada masyarakat yang sedang melakukan atau yang sudah melakukan izin usaha agar dapat memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, seperti sertifikasi halal agar terjaminnya kehalalan produk mereka.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ahmad, Beni. 2015. *Fiqih Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun)*. Bandung : Pustaka Setia.
- Al Ashya, Thobieb. 2003. *Bahaya Produk Haram*. Jakarta : Mawardi Prima.
- Al Qordhoi, Yusuf. 2004. *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana.
- Ali Daud, Moshammad. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cetakan keempat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin. 2003. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Persada.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Seriifikasi Halal*, UIN-Maliki Press.
- Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Kencana, Prenada Media Group.
- El-Basyiry, Munib, Abdullah. 2017. *Meneladani Kepemimpinan Khalifah (Khulafaur Rasyidin dan Khilafah Pilihan)*. Jakarta : AMZAH.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Helambang, Saifuddin. 2018. *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, Kalimantan Barat : Ayunindya.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta : Perenadamedia Group.
- Juliansyah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana.
- Marzuki, Mamud, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mu, Ahmad & Yodo, Sutarman. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. Ke-7, Edisi Ke-1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*. PT. Bina Ilmu.
- Ramadhan, Muhammad. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh siyasah*, Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Managenent. cet. 1.
- Sagori, Djaman. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta CV.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalih, Syaikh. 2011. *Fiqih Makanan Tentang Makanan Halal dan Haram*. Jakarta : Griya Ilmu.

Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung : Pustaka Setia.

Siyota, Sandu & Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media.

Sukardja, Ahmad. 2014. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Sulastri, Lilis. 2016. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. LGM : LaGood's Publishing.

Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Hukum*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.

Tahqiq, Nanang. 2004. *Politik Islam*. Jakarta : Prenada Media.

Wajdi, Farid. 2009. *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yaqub, Mustafa, Ali. 2013. *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta : PT. Pustaka Firdaus.

Al-Qur'an :

Kementerian Agama RI. 2018. *Al-Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah & Tajwid Berwarna Metode TIKRAR*. Juz 1-30. Bandung : Jawa Barat.

Kamus :

Anwar, Desi. 1984. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 8 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 8 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Jurnal :

Melissa Aulia Hosana, Jurnal Hukum Adigma : *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*. Diunduh Senin, tanggal 05 April 2020, pukul 15.45.

Pu'wati Paju, *Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Lex Crimen Vol.V/No.5/Juli, 2016. Diunduh Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, pukul 15.45.

Internet:

<http://digilib.uinsby.a.c.id/12852/4/BAB%201.pdf> diunduh Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, pukul 15.57 WIB.

<http://eprints.umm.a.c.id/37720/2/jiptumpp-gdl-elianadama-47910> diunduh Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, pukul 11.53 WIB.

<http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/127110595/bab1.pdf> diunduh Rabu, tanggal 10 Maret 2021, pukul 21.42 WIB.

<https://idalamat.com/alamat/15548/dinas-koperasi-dan-ukm-kota-pekanbaru-riau> diunduh Selasa, tanggal 06 April 2021, pukul 20.10 WIB.

<https://journal.uir.ac.id/Millah/article/download/8412/7327> diunduh Kamis, tanggal 10 September 2020, pukul 21.23 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu Fitri, S.STP, selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Investasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.



Wawancara dengan Kakak Shella Wulandari selaku pengusaha UMKM (Nyonya Boss) Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Shella Wulandari selaku pengusaha UMKM Yenni (Pempek Yess) Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.



Wawancara dengan Kakak Shella Wulandari selaku pengusaha UMKM Devi Wardia Ningsih (Aroma Bakery) Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **"PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL UMKM DI KOTA PEKANBARU MENURUT PANDANGAN Fiqih SIYASAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : MARDIANI HARAHAHAP
NIM : 11720425090
Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/tanggal : Senin, 05 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ujian Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Ahmad Fauzi, SI., MA

Penguji 1

Dr. Zainal Arifin., MA

Penguji 2

Rahman Alwi., M. Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mardiani Harahap
NIM : 11720425090
Jurusan : Hukum Tata Negara (SIYASAH)
Judul : Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Umkm Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyash

Pembimbing : Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KOPERASI UKM KOTA PEKANBARU
 Jl. Teratai No. 83 A Telp. (0761) 21462 Fax. (0761) 21462

B = Biasa
 R = Rahasia
 P = Penting

LEMBAR DISPOSISI **B R P**

BARU
AN POLITIK

99 PEKANBARU



Tahun 2008 Tentang
 Tahun 2009 Tentang
 Tahun 2016 Tentang
 18 Tentang Penerbitan
 Tahun 2016 Tentang
 kanbaru.
 in Pelayanan Terpadu
 I-RISET/37031 tanggal
 an Riset/Pra Riset dan

LAI KEC. XIII KOTO
 HUN 2014 TENTANG
 ANBARU MENURUT

ditetapkan yang tidak
 lan data ini.
 ng mulai tanggal Surat
 ninggalkan photo copy
 dan Kesatuan Bangsa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menyebarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perihal : Suket Penelitian Mardiani Harahap		Tgl. Diterima 18/02/2021	
Tanggal : 18/12/2020		Tgl. Penyelesaian	
Asal : Badan Kesbangpol			
1. Sekretaris	5. Subbag Umum & Kepegawaian	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Bidang Kelembagaan	6. Subbag Keuangan	<input type="checkbox"/>	
3. Bidang Promosi, Pengembangan Usaha Sarana dan Prasarana	7.	<input type="checkbox"/>	
4. Bidang Fasilitas, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas	8.	<input type="checkbox"/>	
INFORMASI			
Untuk Mewakili Kadis			
Untuk Diproses / Diselesaikan			
Untuk Dimaklumi / Diketahui			
Untuk Bahan / Materi			
Untuk Pertimbangan			
Untuk Umumkan			
<p><i>Beri data dan info sesuai judul penelitian</i> <i>Buat suket jika selesai</i> <i>18/02/21</i> <i>3/2</i> <i>Emi 31/3-21</i> <i>18/2-21</i></p>			
Kepala,			

dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
 Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Desember 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Pekanbaru
 Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga



HJ. KASNAWATI. K, SH
 Petata Tingkat I
 NIP. 19630925 199602 2 001

Tembusan

Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/2716



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37031 tanggal 7 Desember 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **MARDIANI HARAHAP**
 NIM : **11720425090**
 Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **DUSUN III TANJUNG ALAI DESA TANJUNG ALAI KEC. XIII KOTO KAMPAR-KAMPAR**
 Judul Penelitian : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL UMKM KOTA PEKANBARU MENURUT PADANGAN FIKIH SIYASAH**
 Lokasi Penelitian : **DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Desember 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga



HJ. KASNAWATI. K, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19630925 199602 2 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MARDIANI HARAHAHAP, Lahir di Desa Tanjung Alai pada tanggal 31 Mei 1997. Anak Pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Saprial dan Ibunda Ermita. Pendidikan yang ditempuh penulis adalah SD Negeri 030 Tanjung Alai Lulus Tahun 2010. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, penulis melanjutkan SMP Negeri 01 XIII Koto Kampar Lulus Tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 XIII Koto Kampar Lulus Tahun 2016. Setelah dinyatakan lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Berkat do'a dan Motivasi dari keluarga serta teman-teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UMKM Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah”**. Lulus setelah dimunaqasyakan dengan IPK terakhir 3.54 (Cumlaude) pada tanggal 05 Juli 2021 dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).